

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara.

Secara historis, epistemologis dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau Kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri dalam Winataputra dan Budimasyah, 2012:94).

Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat

mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (di terjemahkan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.

Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Winataputra dan Budimasyah, 2012 : 95). Secara umum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama dan kebudayaan (Somantri, 2001:298)

Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang

berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.

Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:96)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripitakan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan

pendekatan *spiral* meluas atau *spiral of concept development* (Taba dalam Winataputra Dan Budimansyah, 2012:96). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses *value incucation* dan *knowledge dissemination*. Hal tersebut dapat lihat dari materi pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka

kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut :

- (a) Kewarganegaraan (1956)
- (b) *Civics* (1959)
- (c) Kewarganegaraan (1962)
- (d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
- (e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
- (f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994)
- (g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)

Dari penggunaan istilah tersebut sangat terlihat jelas ketidak tetapnya dalam mengorganisir Pendidikan Kewarganegaraan, yang berakibat pada krisis operasional, dimana terjadinya perubahan konteks dan format pendidikannya. Menurut Kuhn (dalam Winataputra dan Budimansyah 2012:74) krisis yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep atau istilah yang digunakan untuk pelajaran PKn (pendidikan kewarganegaraan) Krisis operasional tercermin terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak dari

penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep. Kedua jenis krisis tersebut terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai *socio-political institution*, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan pada suatu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, disisi lain, istilah Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan kepekaan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*global cociety*).

Menurut Azra (2002 :7) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan;

“Pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Karena, pendidikan kewarganegaraan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga, demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang

terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif dan sebagainya”.

Dalam penjelasan diatas menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan cakupannya lebih luas dibandingkan Pendidikan Demokrasi dan HAM. karena di dalam pendidikan kewarganegaraan memuat Pendidikan Demokrasi dan HAM yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi lembaga-lembaga dan lain sebagainya.

Sejalan dengan Azra, Zamroni (dalam Azra 2002:7) pun mengungkapkan pendapatnya bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”.

Menurut definisi diatas menunjukan Pendidikan Kewarganegaraan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan negara dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menjelaskan tentang standar isi di dalam kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami maupun melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dapat dinilai dari segi agama, dan sosiokultural. Hal ini diiringi dengan tidak membedakan suku bangsa dan usia warganegara. Pembentukan kepribadian warganegara ini sangat penting dilakukan, karena tujuan negara akan tercapai dengan dukungan kompetensi yang dimiliki oleh warganegara.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, walaupun sempat beberapa kali terjadi perubahan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, namun perubahan nama yang terjadi tidak mengurangi esensi Pendidikan Kewarganegaraan sendiri yang pada dasarnya dari setiap perkembangan tersebut tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tetap sama yaitu untuk membentuk warga negara yang baik (*to be a good citizenship*), hal ini diperkuat dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007 :1) mengatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.”

Dalam konteks ini Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Sedangkan Menurut Ubaedillah (2015:18) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia antara lain:

- a. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan siswa yang memiliki pengetahuan, sikap positif, bertanggungjawab serta dapat melakukan perubahan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut Depdiknas (2006:4) mengutarakan bahwa “watak/karakter Kewarganegaraan (*civics disposition*) merupakan ‘muara’ serta dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. Dengan demikian seseorang warganegara pertama-tama harus memiliki pengetahuan Kewarganegaraan yang baik, dengan pengetahuan yang baik seorang warganegara diharapkan dapat memiliki keterampilan secara intelektual dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatu

watak/karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yaitu sikap dan kebiasaan yang mencerminkan seorang warga negara yang baik.

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Secara khusus, dapat dicermati pada penjelasan pasal 37 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks ini Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua *imperative* atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang ada gilirannya dapat menumbuhkan *civic intelligent* dan *civic participation* serta *civics responsibility* sebagai warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki fungsi esensial dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia supaya memiliki keterampilan hidup bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Soemantri (2001 :166) memberikan pemaparan mengenai fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

“Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional,

yang mewujudkan dalam integrasi peibadi dan prilaku sehari-hari”.

Dalam konteks diatas menyatakan bahwa fungsi Pendidikan Kewarganegaraan tidak lain dari usaha sadar dan terencana dalam memberikan kemudahan belajar bagi siswa supaya tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Dalam standar kompetensi dasar (Depdiknas, 2006 :2) menyatakan bahwa

“fungsi dan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) serdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara indonesia yang mereflesikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945.”

Dalam konteks di atas menyatakan bahwa fungsi pendidikan pancasila sebagai wahana pembentukan karakter yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 serta mencapai tujuan nasional.

B. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut Sanjaya (2010:58), komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut diatas jika dilaksanakan dengan baik dan sistematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah

dan fokus pada target yang akan dituju serta diharapkan meningkatkan motivasi pendidik maupun siswa dalam proses belajar dan mengajar.

Prinsip dasar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Menurut Budimansyah (2002:8) prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (*student active learning*), kelompok belajar kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (*reactive learning*). Maka prinsip belajar siswa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Belajar Siswa Aktif

Model ini menguat prinsip belajar siswa aktif. Aktifitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran. Dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan dilapangan, dan dilaporan. Dalam fase perencanaan aktifitas siswa terlihat pada saat pengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (*brain storming*). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang baik baginya, tentu saja yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan *voting* untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

Dalam fase kegiatan lapangan, aktifitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuisisioner dan lain-lain) dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang

menjadi kajian kelasnya. untuk melengkapi data dan informasi tersebut, dengan mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan ada kalanya mengabadikan peristiwa penting dalam video.

b. Kelompok Belajar Kooperatif

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama sama antar siswa dan antar kelompok-kelompok lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga yang terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama.

Dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali harus dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga. Orang tua perlu juga diberi pemahaman, manakalanya anaknya pulang agak terlambat dari sekolah karena melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali lagi, dari peristiwa ini

pun tampak perlunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam upaya membangun kesepahaman.

Kerjasama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para siswa merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. Misalkan mengunjungi dinas pemarkiran, mengunjungi kantor bupati atau walikota untuk mengetahui kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima. Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik pada suatu kawasan tertentu, dan sebagainya. Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar dari kepala sekolah selaku tanggungjawab kegiatan sekolah.

c. Pembelajaran Partisipatorik

Selain prinsip pembelajaran diatas, pendidikan kewarganegaraan juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil melakoni (*learning by doing*). Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi.

Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk kajian kelas memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat

berlangsungnya perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin, proses ini mendukung adagium yang menyatakan bahwa *democracy is not heredity but learning* (demokrasi itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dipahami). Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana demokratis (*teaching democracy in and for democracy*). Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan kata lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatorik.

d. Mengajar Yang Reaktif

Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu guru memahami situasi sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa, jika hal ini terjadi maka guru harus segera mencari cara untuk mengunggulinya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. Ciri guru yang reaktif itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar

- 2) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami siswa.
- 3) Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pembelajaran sebagai suatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan siswa.
- 4) Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Bila hal itu ditemui, ia segera menanggulangnya.

Menurut Samana (1994 : 30) beliau menjelaskan bahwa guru profesional dituntut memiliki 10 hal, yaitu:

- 1) Menguasai bahan ajar.
- 2) Mampu mengelola program belajar mengajar.
- 3) Mampu mengelola kelas.
- 4) Mampu menggunakan media dan sumber pengajaran.
- 5) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- 6) Mampu mengelola interaksi belajar mengajar
- 7) Mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran
- 8) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- 9) Mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah.

Dalam konteks ini bahwa guru dituntut memiliki kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat tercapainya keberhasilan dalam proses pembelajaran,

2. Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut David (Sanjaya 2010 :126) dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai “*a plan method, or series of activities*

designed to achieves a particular educational goal” dalam penjelasan diatas strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Ada dua hal yang patut dicermati dalam pengertian diatas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan) termasuk penggunaan metode dan manfaat sebagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan sebagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan.

Kemp (Sanjaya, 2010:126) menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran yakni:

“suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu”

Pada dasarnya tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Itulah, sebabnya, seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran agar dalam menjalankan tugasnya dapat memilih

alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 5-6) ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.
- b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup.
- c. Memilih dan menerapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat menjadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
- d. Menciptakan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar dan mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat kesempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa suatu strategi pembelajaran yang tepat adalah harus seimbang yakni dengan memperhatikan isyarat-isyarat seperti yang disebutkan diatas. Seimbang disini berarti harus tepat dalam mempertimbangkan penggunaan pendekatan, metode dan unsur lain yang dapat bermanfaat untuk keberhasilan belajar mengajar.

3. Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:

50). Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Menurut Djamarah dan Zain (2002: 50) Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, yaitu:

- 1) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi, yang ingin dicapai.
- 2) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa pada umumnya.
- 3) Materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan.
- 4) Materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat tekstual maupun kontekstual

Berdasarkan rumusan diatas, maka materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus berdasarkan pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang dibelajarkan harus bermakna bagi siswa dan merupakan hal yang benar-benar penting, baik dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk menentukan materi pada proses pembelajaran selanjutnya.

Materi pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pembelajaran (*subject- centered teaching*), materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran yang akan menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran yang dapat ditentukan oleh beberapa siswa yang dapat menguasai materi kurikulum (Sanjaya 2007:141).

Menurut Sanjaya (2007 :142) materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga : pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*),

dan sikap (*attitude*). Pengetahuan tersebut menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran (*mind*) siswa, dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala siswa dapat menunjukkan kembali.

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Sanjaya (2007:145) “Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran tersebut, karena suatu strategi pembelajaran harus diimplementasikan salah satunya dengan melalui metode pembelajaran

Pembelajaran dapat dilakukan dengan pola langsung (*direct*) atau tidak langsung (*non-direct*). Direct dimaksudkan bahwa pembelajaran dikemas oleh dan sampai/ dilakukan langsung oleh guru sedangkan non-direct merupakan pembelajaran yang dikemas oleh guru bersama sama siswa yang kecenderungannya proses pembelajaran secara aktif dilakukan oleh siswa. Dua pola ini akan sangat berhubungan dengan pemahaman sejumlah jenis metode pembelajaran.

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan kedalam teknik dan gaya pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasi suatu metode

secara spesifik. Misalnya penggunaan model ceramah dalam kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan Teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas.

Begitu juga penggunaan metode diskusi perlu digunakan Teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Sedangkan gaya pembelajaran atau taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau Teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Terlihat dari cara guru dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Misalnya ada dua guru menggunakan metode yang sama yaitu metode ceramah. Akan tetapi, dalam penggunaannya mempunyai perbedaan satu guru menggunakan metode ceramah dalam pelaksanaannya tetapi cenderung banyak diselingi dengan humor karena guru memiliki *sense of humor* agar siswa tidak tiasa jenuh dan guru yang satunya kurang memiliki rasa humor namun banyak menggunakan alat bantu elektronik agar pembelajaran terlihat menarik. (Komalasari 2011:56)

Adapun beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, menurut Sanjaya (2007:145) diantaranya:

- a. Metode ceramah
- b. Metode demonstrasi
- c. Metode diskusi
- d. Metode simulasi

- e. Laboratorium
- f. Pengalaman lapangan
- g. Brainstorming
- h. Debat
- i. Simposium

Metode tersebut dapat digunakan untuk mengimplementasikan ke dalam strategi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran.

5. Media Pendidikan Kewarganegaraan

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “*medium*”, yang secara harfiah berarti “perantara pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. (Djamarah dan Zain, 1010:120).

Sedangkan media pembelajaran menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media sebagai alat komunikasi merupakan segala sesuatu yang membawa informasi (pesan) dari sumber informasi kepada penerima informasi.”

Bedasarkan konteks diatas menunjukan bahwa media pembelajaran merupakan segala wujud yang tepat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perhatian, kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran.

Media pengajaran harus dibedakan dengan sumber pengajaran. Djahiri (1996 :31) mengemukakan bahwa sumber pembelajaran merupakan tempat dimana butir mata pelajaran dan media bisa dilihat,

diperoleh dan dikaji seperti buku, perpustakaan, media cetak, kehidupan nyata, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran lebih diutamakan pada fungsi dan perannya.

Jenis dan bentuk media yang ditemukan oleh Djamarah dan Zain (2010: 124-125) antara lain:

a. Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam:

1) Media *auditif*

Media *auditif* adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, *cassette recorder*, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau yang mempunyai kelainan pendengaran.

2) Media *visual*

Media *visual* adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media *visual* ini ada yang menampilkan gambar dalam seperti film *strip* (film rangkai), *slides* (film bingkai), foto, gambar atau lukisan dan cetakan. Adapula media *visual* yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun.

3) Media *audiovisual*

Media *audiovisual* adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Ada beberapa macam media *audiovisual* di antaranya:

a) *Audiovisual* diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (*sound sliders*), film bingkai suara, dan cetak suara.

b) *Audiovisual* gerak, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video *cassatte*.

Adapun Pembagian lain dari media *audivisual* diantaranya:

a) *Audiovisual* murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film *video-cassatte*, dan

b) *Audiovisual* tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari *slides projector* dan unsur suaranya bersumber dari *tape recorder*. Contoh lainnya adalah film *astrip* suara dan cetak.

b. Dilihat dan daya liputannya, media dibagi kedalam:

1) Media dengan daya liput luas dan serentak

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama, contoh: radio dan televisi.

2) Batas oleh ruang media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat.

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti: film, *sound slides*, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap.

3) Media untuk pengajaran individual

Media ini penggunaannya untuk seorang diri. Yang termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer.

c. Dilihat dari bahasa pembuatannya, media dibagi dalam:

1) Media sederhana

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit.

2) Media kompleks

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh, mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai.

Pada dasarnya proses pembelajaran sama dengan proses komunikasi atau proses informasi yaitu proses menerima, menyimpan dan mengungkap kembali informasi. Dalam penggunaan media ini harusnya menjadi bahan pertimbangan guru ketika akan memilih dan menggunakan media yang tepat untuk digunakan dalam pengajaran.

6. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wand and Brown (dalam Djamarah dan Zain, 2010 :50), evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa evaluasi adalah suatu proses yang dapat menentukan nilai dari

sebuah tindakan. Dengan evaluasi pembelajaran, evaluasi dilakukan pada kegiatan akhir dalam bentuk refleksi dan praktek pembelajaran. Dalam mengevaluasi pembelajaran guru sebaiknya mengadakan berbagai macam penilaian. Mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Djamarah dan Zain, 2010 : 50-51), menegaskan bahwa tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- 1) Tujuan umum dari evaluasi adalah:
 - a) Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
 - b) Memungkinkan pendidik/guru menilai aktifitas/ pengalaman yang didapat.
 - c) Menilai metode mengajar yang dipergunakan.
- 2) Tujuan khusus dari evaluasi adalah:
 - a) Merangsang kegiatan siswa.
 - b) Menentukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan
 - c) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan.

Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai siswa, dan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu system pembelajaran untuk mengetahui keefektifan dan efisien system pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan maupun system penilaian itu sendiri.

C. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembentukan Karakter

1. Pengertian Karakter

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada siswa sehingga siswa memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. (Zubaedi, 2011:17)

Siswa yang berkarakter adalah siswa yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusannya. siswa tahu apa yang siswa perbuat dan tahu pula apa yang akan siswa dapatkannya dari perbuatan tersebut.

Di dalam tulisan bertajuk ugresi pendidikan karakter, Suyanto, (dalam Zubaedi, 2011 : 11), menjelaskan bahwa:

“karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.”

Karakter seperti juga kualitas diri yang lainnya, karakter ini tidak berkembang dengan sendirinya. Perkembangan karakter pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Setiap manusia mempunyai potensi bawaan yang akan termanis festasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan.

Karakter mengalami pertumbuhan yang membuat suatu nilai menjadi budi pekerti, sebuah watak batin yang dapat di andalkan dan digunakan untuk merespon berbagai situasi dengan cara yang bermoral. Dalam kontekstual ada beberapa sejumlah karakteristik kepribadian, yakni *civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat), *individual responsibility* atau tanggung jawab individual, *self discipline* atau disiplin diri, *civic mindednes* atau kepekaan terhadap masalah kewarganegaraan, *open mindednes* (terbuka, skeptis, mengenal ambiguitas), *compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi). *Toleration of dipersity* atau toleransi atas keberagaman, *patience and persistence* atau kemurahan hati, and *loyalty to the nation and its priciples* atau kesetiaan pada bangsa atas segala aturan *prinsipnya quigley* (Budimansyah, 2012: 13).

Kesemua itu, merupakan keadaban yang mencakup penghormatan dalam berinteraksi dengan masyarakat, bertanggungjawab diri, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, memiliki sikap terbuka, kurang percaya pada ketidakjelasan, memiliki sikap kompromi pada prinsip konflik dan batasan kompromi, memiliki rasa toleransi atau sikap saling menghargai antar umat beragama, kemurahan hati, kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Thomas Lickona dalam *Educating for Character: how our scholls can teach respect and responibility* (1991) menyatakan bahwa

“karakter mengandung tiga bagian yang saling berhubungan yaitu *moralknowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*. Oleh karena itu karakter yang baik mengandung tiga hal yaitu mengetahui yang baik (*knowing the good*), menginginkan hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*)”.

Kompetensi *civic disposition* atau watak kewarganegaraan yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi masyarakat adanya pemerintah mandiri yang bertanggungjawab dari tiap individu. Karakter sebagai warga negara yang baik menurut Branson (dalam Budimansyah, 2012: 205) terbagi menjadi dua jenis, yakni:

“karakter privat seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.”

dalam konteks diatas Karakter privat tersebut pada umumnya karakter yang dimiliki oleh diri seseorang/individu. Karena bersifat pribadi karakter ini hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, dan wajib

dimiliki. sedangkan karakter publik pada umumnya karakter yang bersifat yang ditunjukan kepada kelompok orang/ masyarakat dan penting dalam kelangsungan hidup bermasyarakat.

Kemudian konsep karakter baik (*good character*) menurut Thomas Lincona (2013 :72) sebagai suatu kebajikan (*virtue*) yang dibagi kedalam dua kategori, yakni kebajikan diri sendiri (*self oriented virtous*) dan kebajikan pada orang lain (*other oriented virtous*). yakni kebajikan diri sendiri (*self oriented virtous*) misalnya pengendalian diri, kesabaran dan kebersihan diri. Kebajikan terhadap orang lain (*self oriented virtous*) misalnya kesediaan berbagi dan merasakan kebahagiaan, saling membantu dan kerjasama. Itu menandakan bahwa watak kenegaraan mengacu pada kebajikan-kebajikan yang ditunjukan kepada diri sendiri maupun orang lain agar dapat merasakan kebahagiaan, saling berbagi, saling membantu dan mampu berkejasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut filosof Aristoteles (dalam Lickona, 2013) karakter yang baik didefinisikan sebagi hidup dengan tingkah laku yang benar dalam hal berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri. Aristoteles mengingatkan tentang sesuatu yang dijamin modern ini cenderung dilupakan: hidup dengan budi pekerti yang berarti menjalani kehidupan dengan berbudi baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan kedua macam budi pekerti ini

saling berhubungan. Maka siswa harus bisa mengontrol diri-hasrat, nafsu supaya dapat melakukan hal yang benar pada orang lain.

Karakter (*character*) mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*), motivasi (*mitivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter meliputi sikap keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti krisis alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakat.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku yang berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, sosial, emosional, dan estetika). Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik (Zubaedi, 2011 :10). Maka dari itu, pendidikan karakter harus dibentuk ke dalam diri siswa, supaya siswa dapat menerapkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam kehidupannya.

2. Tujuan Pembentukan Karakter

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak yang mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semuanya oleh iman dan takwa kepada Tuhan YME berdasarkan Pancasila.

Dalam pasal 3 UUD RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional secara imperatif digariskan bahwa:

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pendidikan berfungsi sebagai pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (*mission sacre*) Pendidikan Kewarganegaraan ..

Menurut Zubaedi (2011:18) karakter memiliki lima tujuan diantaranya:

- a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/efektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa dan religius.

- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa.
- d. Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan rasa kebangsaan yang tinggi serta penuh kekuatan (*dignity*)

Dalam penjelasan di atas bahwa karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam siswa dan menanamkan jiwa kepemimpinan serta tanggungjawab siswa dalam mengembangkan kreatifitas, jujur dan rasa kebangsaan yang tinggi. Supaya siswa dapat menjadi warga negara yang berkarakter.

Kemudian menurut Kemdiknas (2010 :5) Tujuan Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

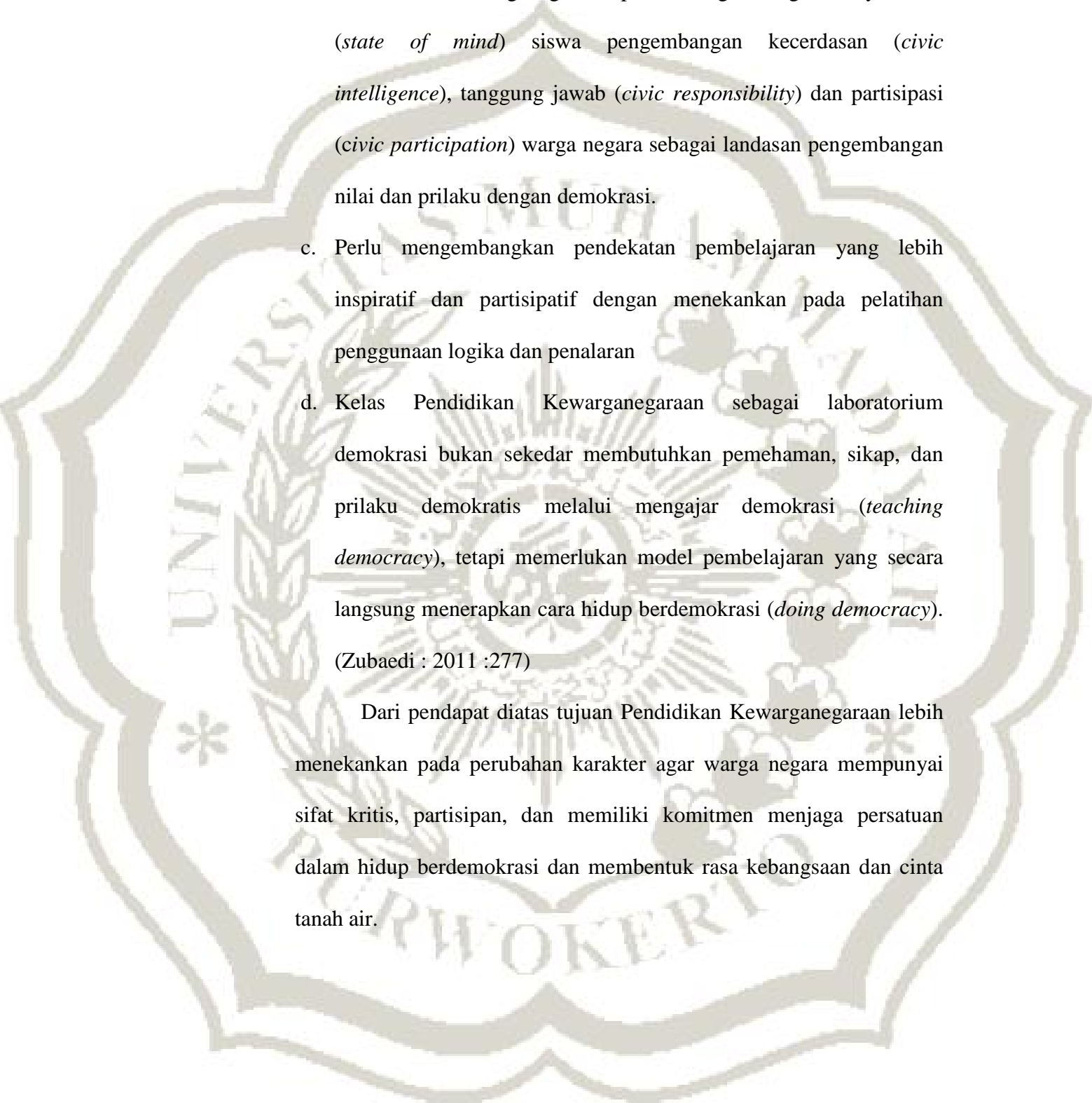
Maka dalam penjelasan diatas cukup jelas bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk menjadikan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawan.

3. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembentukan Karakter

Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter tertuang dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang dinyatakan bahwa *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Menurut Malik Fajar (dalam Zubaedi : 2011 :277) menyatakan bahwa *“Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”*, dari pendapat diatas pentingnya Pendidikan Kewarganegaraann sebagai wahana mengembangkan karakter siswa. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan harus dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif. Dengan memperhatikan 4 hal yaitu:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengembangkan kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual sosial (berfikir, bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup masyarakat).

- 
- b. Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengembangkan daya nalar (*state of mind*) siswa pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*) dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan prilaku dengan demokrasi.
- c. Perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran
- d. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi bukan sekedar membutuhkan pemahaman, sikap, dan prilaku demokratis melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), tetapi memerlukan model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*).
(Zubaedi : 2011 :277)

Dari pendapat diatas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada perubahan karakter agar warga negara mempunyai sifat kritis, partisipan, dan memiliki komitmen menjaga persatuan dalam hidup berdemokrasi dan membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

D. Hakikat Media Sosial Facebook

1. Pengertian Media Sosial

Pengertian media sosial atau dalam bahasa Inggris “*Social Media*” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “*Social*” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “*Media*” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri (Arifin, 2014)

Maka media sosial secara garis besar dapat dikatakan sebagai sebuah media online, dimana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa *blog*, *wiki*, *forum*, *jejaring sosial*, dan ruang *virtual* yang disongkong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial, *blog* dan *wiki* (Mulyati, 2014:25).

Menurut Kaplan dan Haenlein (Arifin 2014: 1) menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:

a. proyek kolaborasi (*Collaborative projects*)

proyek kolaborasi merupakan *website* Suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Ada dua *sub* kategori yang

termasuk ke dalam *collaborative project* dalam media sosial tersebut, seperti *wikipedia*, *Bookmark Sosial*

b. *blog* atau *microblog*,

Blog dan *mikroblog* merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunaannya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. *Blog* sendiri ialah sebuah *website* yang menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari. seperti : *blogspot(blogger)*, *twitter*, *wordpress*

c. konten (*content*) atau isi,

Content communities atau konten masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti *video*, *e-book*, gambar, dan lain – lain. seperti *youtube*, *4shared*.

d. Situs *jejaring sosial (social networking)*

Jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs *jejaring sosial* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. seperti misalnya *Facebook*, *friendster*.

e. *virtual game world*,

virtual game world, merupakan pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *game online*.

f. *virtual social world*,

virtual social world merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia *virtual* untuk berinteraksi dengan orang lain *virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *second life*, and *googleEarth*

2. Macam Jenis Aplikasi Media Sosial

Menurut Mulyati (2014 : 62) berbagai macam Jenis aplikasi media sosial (medsos) yang cukup populer dan lumayan berpengaruh untuk masyarakat indonesia:

a. Aplikasi media sosial berbagi video (*video sharing*),

Aplikasi media sosial jenis ini umumnya bertujuan untuk mempublikasikan /men-*share video, e-book, foto*, seperti:

1) *Youtube* (www.youtube.com)

2) *Vimeo* (www.vimeo.com)

3) *Dailymotion* (www.dailymotion.com)

b. Aplikasi media sosial *microblog*,

Aplikasi media sosial jenis ini umumnya bertujuan untuk mendapat kebebasan dalam mengungkapkan sesuatu hal di *blog* itu, seperti:

1) *Twitter* (www.twitter.com)

2) *Tumblr* (www.tumblr.com)

c. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial

Aplikasi media sosial jenis ini umumnya bertujuan untuk membuat informasi yang bersifat pribadi seperti:

1) *Facebook* (www.facebook.com)

2) *Google plus* (<https://plus.google.com>)

3) *Path* (www.path.com)

d. Aplikasi berbagi jaringan profesional

Aplikasi media sosial jenis ini pada umumnya digunakan oleh jaringan profesional yang terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat, contoh aplikasi yang sangat populer antara lain:

1) *LinkedIn* (www.linkedin.com)

2) *Scribd* (www.scribd.com)

3) *Slideshare* (www.slideshare.com)

e. Aplikasi manager twitter :*Tweetdeck* (www.tweetdeck.com)

f. Aplikasi berbagi foto

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia, karena dapat menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, lucu, aneh, eksotis bahkan menyeramkan, berikut aplikasi yang populer diantaranya:

- 1) *Pinterest* (www.pinterest.com)
- 2) *Picasa* (www.picasa.com)
- 3) *Flickr* (www.flickr.com)
- 4) *Instagram* (www.instagram.com)

3. Facebook Sebagai Media Sosial

Seperti yang dikatakan sebelumnya media sosial yang paling populer saat ini adalah *facebook*. *facebook* merupakan suatu situs jaringan sosial yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang ada di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya (Madcom, 2010 :1).

Menurut Arifin (2014 :6) *Facebook* merupakan situs *web* jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Pada awalnya, *facebook* hanya digunakan untuk kalangan terbatas lingkungan kampus saja. Namun dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga mendunia termasuk Indonesia (Mulyati, 2014:72).

Menurut data the New York Times, pada april 2010, negara yang memiliki pengguna *facebook* terbanyak adalah Amerika Serikat, Britania Raya dan Indonesia. *Facebook* memang memiliki arti tersendiri bagi warga Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna *facebook* terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. (Mulyati, 2014:72)

Melihat perkembangan yang sangat cepat ini. Sebuah buku yang berjudul *The Facebook Effect : The Inside Story Of The Company That Is Connecting The World* ditulis oleh *David Kirkpatrick* mencoba menelastik ke dalam bagaimana *facebook* awal mulanya di bangun dan seberapa jauh efek dari *facebook* tersebut terhadap kehidupan penggunanya dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, bahkan keamanan negara, (http://www.kompasiana.com/kimi_raikko78/the-inside-of-facebook_5500a9cb8133110a1afa7a89)

Dalam buku tersebut diketahui bahwa ternyata konsep *facebook* saat sekarang ini tidak jauh dari profil pendirinya, *Mark Zuckerberg*, *facebook* bersifat *openness*, *breaking things*, *revolutions*, *information flow*, *minimalism*, *making things*, *eliminating desire for all that really doesn't matter*. *Openness* dibuktikan oleh *facebook* bahwa informasi yang ada di *facebook* terbuka oleh siapa saja, seluruh profil pengguna *facebook* terbuka untuk dilihat oleh siapa saja selagi ia pengguna *facebook*. *Breaking things* dibuktikan dengan kemampuan *facebook* mematahkan apa saja yang selama ini hampir

tidak mungkin dicapai dalam sejarah *internet*, salah satunya jumlah anggota terbanyak. Fakta-fakta lain adalah jumlah foto yang akan mencapai 100 miliar dan tentu masih banyak lagi yang lain. *Information flow*, artinya di *facebook* banyak sekali informasi tersedia. Banyak orang dan mungkin merupakan salah satu kegiatan utama di *facebook*, yaitu berbagi informasi melalui *link-link* yang di *share* di *facebook*. Bahkan kini kecenderungannya, *facebook* sudah digunakan oleh banyak jurnalis untuk menyampaikan berita terkini yang siswa dapatkan. (http://www.kompasiana.com/kimi_raikko78/the-inside-of-facebook_5500a9cb8133110a1afa7a89)

Revolution, mungkin bisa diartikan bahwa *facebook* bisa menimbulkan revolusi di beberapa negara, seperti Mesir, Yaman, mungkin juga Bahrain. Perlu diketahui sewaktu pertama kali diperkenalkan di tahun 2004 yang lalu, pengguna *facebook* yang waktu itu masih sangat sedikit langsung mengeluarkan unek-unek politik di *facebook* saat pertama kali *facebook* diluncurkan dan mengadakan perlawanan politis terhadap ketentuan di kampus sehingga tidak salah kiranya sampai sekarang pun *facebook* tetap digunakan untuk hal-hal yang berbau politik dan revolusi. (http://www.kompasiana.com/kimi_raikko78/the-inside-of-facebook_5500a9cb8133110a1afa7a89)

Minimalism dibuktikan dengan tampilan *facebook* yang memang *minimalis*, sangat tidak ribet, orang yang pertama kali ke

facebook saja akan langsung paham dengan pengaturan di *facebook* serta *layout* ini. *Making things*, sehingga penggunanya bisa membuat apa saja di *facebook*, berjualan, membuat *page* untuk diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya. *Eliminating desire for all that really doesn't matter*, artinya *facebook* telah berhasil mengarahkan keinginan banyak orang untuk berbuat sesuatu yang tidak berarti untuk beraktivitas di *facebook* (yang mungkin masih bisa dipertanyakan apakah lebih berarti).(http://www.kompasiana.com/kimi_raikko78/the-inside-of-facebook_5500a9cb8133110a1afa7a89)

Dengan konsep ini, *facebook* tidak terlalu heran bisa sangat sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berhasil mengubah selera banyak orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis.

4. Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Facebook

Facebook merupakan media sosial yang sangat populer di kalangan siswa tentunya memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Menurut Kurniawan (2013 :11) Ada dua dampak yang dihasilkan oleh *facebook* diantaranya:

a. Dampak positifnya adalah:

- 1) Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan ketrampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.

2) Memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs jejaring sosial ini anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak pernah mereka temui secara langsung.

3) Anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain.

4) Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. (<https://ahmadkurniawan093.wordpress.com/pengaruh-facebook-terhadap-pendidikan-anak/>)

b. Dampak Negatifnya adalah:

1) Tidak peduli dengan sekitarnya

Orang yang sudah kecanduan *facebook* terlalu asyik dengan dunianya sendiri (dunia yang diciptakannya) sehingga tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Seseorang yang telah kecanduan *facebook* sering mengalami hal

ini. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dunianya berubah menjadi dunia *facebook*.

2) Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan

Ini dampak dari terlalu sering dan terlalu lama bermain *facebook*. Ini cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial si anak. Mereka yang seharusnya belajar sosialisai dengan lingkungan justru lebih banyak menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya bersama teman teman *facebook*-nya yang rata rata membahas sesuatu yang nggak penting. Akibatnya kemampuan verbal si anak menurun. Tentu yang dimaksud autis di sini bukan dalam arti yang sebenarnya.

3) Menghamburkan uang

Akses internet untuk membuka *facebook* jelas berpengaruh terhadap kondisi keuangan (terlebih kalau akses dari warnet). Dan biaya internet di Indonesia yang cenderung masih mahal bila dibanding negara negara lain (mereka sudah banyak yang gratis). Ini sudah bisa dikategorikan sebagai pemborosan, karena tidak produktif. Lain soal jika mereka menggunakannya untuk kepentingan bisnis.

4) Mengganggu kesehatan

Terlalu banyak nongkrong di depan monitor tanpa melakukan kegiatan apa pun, tidak pernah olah raga sangat beresiko bagi kesehatan. Penyakit akan mudah datang. Telat

makan dan tidur tidak teratur. *Obesitas* (kegemukan), penyakit lambung (pencernaan), dan penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang paling mungkin terjadi.

5) Berkurangnya waktu belajar

Ini sudah jelas, terlalu lama bermain *facebook* akan mengurangi jatah waktu belajar si anak sebagai pelajar. Bahkan ada beberapa yang masih asyik bermain *facebook* saat di sekolah. Ayo ngaku..! “sorry yaw, aQ off dulu, Coz, ada guru nieh..!” Pernah menemukan yang seperti itu..?

6) Kurangnya perhatian untuk keluarga

Keluarga di rumah adalah nomor satu. *Slogan* tersebut tidak lagi berlaku bagi para *facebookers*. Buat mereka temen temen di *facebook* adalah nomor satu. Tidak jarang perhatian mereka terhadap keluarga menjadi berkurang.

7) Tersebarnya data pribadi

Beberapa *facebookers* memberikan data data mengenai dirinya dengan sangat detail. Biasanya ini untuk orang yang baru kenal internet hanya sebatas *facebook* saja. Mereka tidak tahu resikonya menyebarkan data pribadi di internet. Ingat data data di internet mudah sekali bocor, apalagi *facebook* yang gampang sekali di *hack*

8) Mudah menemukan sesuatu berbaur pornografi dan sex

Mudah sekali bagi para *facebookers* menemukan sesuatu yang berbaur porno dan *sex* . Karena kedua hal itu yang paling banyak dicari di internet dan juga paling mudah ditemukan. nah, inilah fakta tidak dewasanya pengguna internet Indonesia. Hanya menggunakan internet untuk mencari konten “berlendir”. Di *facebook* akan sangat mudah menemukan grup *sex*, grup tante kesepian, grup cewek bispak dsb.

9) Rawan terjadinya perselisihan

Tidak adanya kontrol dari pengelola *facebook* terhadap para anggotanya dan ketidak dewasaan pengguna *facebook* itu sendiri membuat pergesekan antar *facebookers* sering sekali terjadi. Contoh paling fenomenal adalah kasusnya “Evan Brimob” beberapa waktu lalu. Kalau kamu nggak tahu Evan Brimob, beuuuh, ketinggalan berita nih..! Evan Brimob adalah seorang anggota kepolisian yang baru kenal *facebook*. Silakan dicari aja di google mengenai Evan Brimob dengan statementnya yang kontroversi: “Polisi nggak butuh masyarakat”.

10) Rawan terjadinya aksi penipuan

Seperti media media lainnya, *facebook* juga rawan terhadap penipuan. Apalagi bagi anak anak yang kurang mengerti tentang seluk beluk dunia internet. Bagi si penipu sendiri, kondisi dunia

maya yang serba anonim jelas sangat menguntungkan.
(<https://ahmadkurniawan093.wordpress.com/pengaruh-facebook-terhadap-pendidikan-anak>)

Dari kedua dampak tersebut maka kehadiran *Facebook* hendaknya bisa digunakan secara bijak oleh pengguna khususnya pada siswa agar tidak terpengaruh pada dampak negatif (tidak baik) yang dihasilkan oleh *facebook*.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dalam permasalahan yang akan diteliti Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembentukan Karakter Dalam Menanggulangi Dampak Media Sosial. Sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan jurnal dengan judul "Dampak Media Sosial (*facebook*) pada karakter siswa" jurnal Pendidikan Kewarganegaraan studi kasus di SMA Negeri 1 Marisa. Bahwa dampak media sosial *facebook* pada karakter siswa terdiri dari 2 yaitu dampak negatif dan positif. Dimana dampak negatif dapat mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu kesehatan, mengurangi bersosialisasi dengan lingkungan, dan dapat menimbulkan perselisihan. Adapun dampak positifnya memperluas pergaulan, memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja dapat belajar mengembangkan teknis dan sosial.

Disinilah siswa dapat berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain, sehingga membuat siswa menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati.

2. Peneliti menggunakan Skripsi Irma Nur Afriani yang berjudul “Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Karakter Peserta Didik sebagai Warganegara Yang Baik di SMP Negeri 2 Banyumas” bahwa pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan cukup berperan dalam meningkatkan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik di SMP Negeri 2 Banyumas, yakni berkat kemahiran guru dalam penggunaan strategi pembelajaran yang berupa metode, media, evaluasi, serta materi dengan cara mengkaitkannya dengan pengetahuan mengenai karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik. Terbukti dengan terlaksananya karakter sebagai warga negara yang baik. Berupa, tanggung jawab, menghargai harkat dan martabat orang lain yang berupa toleransi, kepedulian, keamauan untuk mendengar dan berfikir kritis di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Peneliti menggunakan jurnal dengan judul “Penggunaan Media Sosial (*facebook, twitter, blog*) sebagai sarana komunikasi bagi komunitas”. Jurnal Jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013, karya Novika Eka Setyani, hasil penelitian dari jurnal ini ialah: penggunaan media *social (facebook, twitter, blog)* sangat bermanfaat bagi komunitas

karena media *social* bisa memperluas pertemanan dan memudahkan seseorang berkomunikasi dan memberikan informasi kepada anggotanya/ *followers*.

